

# Analisis Kesenjangan Gender dan Dinamika Pendidikan di Indonesia

*I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani*

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

## Abstrak

Rendahnya capaian *Gender Development Indeks* (GDI) I menunjukkan bahwa pembangunan memberi manfaat yang berbeda terhadap perempuan dan laki-laki. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya nyata dan terfokus dalam bidang pendidikan untuk menghasilkan keluaran yang optimal.

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender dalam hubungannya dengan peningkatan pendidikan di Indonesia. Selain itu juga faktor-faktor apa saja yang dapat dijadikan landasan dalam mendorong kemajuan di bidang kesetaraan gender dan pendidikan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa instrumen untuk menjelaskan fenomena keterpurukan bangsa tampaknya adalah peranan pendidikan dalam membangun karakter bangsa (*character building*). Sudah lebih dari setengah abad merdeka tampak sekali bahwa pembentukan karakter bangsa dalam arti yang sebenarnya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hari pendidikan nasional yang diperingati setiap tahun sudah saatnya dijadikan momentum untuk evaluasi diri dan titik tolak untuk memperbaikinya. Sebagai langkah awal, diskusi yang melibatkan pengambil keputusan dan praktisi pendidikan ke segala tingkatan dengan fokus pembenahan sistem pendidikan secara holistik dan pembangunan karakter bangsa melalui pendidikan, sudah mendesak dilakukan.

**Kata Kunci:** *gender, pendidikan, globalisasi*

## I. PENDAHULUAN

Indikator makro kesenjangan gender adalah *Gender Development Index* (GDI): mengukur kesenjangan gender dilihat dari bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi, dan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan (misal anggota legislative, posisi manajerial, dan sumbangan ekonomi). GDI Indonesia berada pada posisi rendah dibanding Negara-negara lain. Pada tahun 1999: ranking 92 dari 174 negara, dan pada tahun 2003 ranking 91 dari 146 negara. Di ASEAN, peringkat Indonesia ada di urutan terbawan (Singapura, 28; Malaysia, 53; Thailand, 61; Philipina, 66; dan Vietnam, 89).

Rendahnya capaian GDI menunjukkan bahwa pembangunan memberi manfaat yang berbeda terhadap perempuan dan laki-laki. Untuk itu, pemerintah mengubah

strategi pemberdayaan perempuan dari peningkatan peranan wanita dalam pembangunan, menjadi Gender Mainstreaming (pengarusutamaan gender/PUG) dalam pembangunan.

## II. PERMASALAHAN

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender dalam hubungannya dengan peningkatan pendidikan di Indonesia. Selain itu juga faktor-faktor apa saja yang dapat dijadikan landasan dalam mendorong kemajuan di bidang kesetaraan gender dan pendidikan.

## III. METODE PENELITIAN

Dalam rangka memecahkan masalah penelitian ini, pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari data sekunder berupa kaidah-kaidah atau norma-norma yang berlaku. Dalam hal ini pendekatan normatif dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan, kajian literatur. Selain itu dalam penelitian ini juga ditunjang dengan pendekatan empiris guna menganalisis masalah penelitian.

## IV. PEMBAHASAN

Landasan kebijakan perlunya mengintegrasikan kesetaraan dan keadilan gender (bidang pendidikan), meliputi:

- UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Propenas 2000 – 2004: seluruh kebijakan diarahkan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.
- Inpres Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender: menetapkan bahwa setiap instansi pemerintah perlu mengintegrasikan kesetaraan dan keadilan gender ke dalam programnya.
- Kepmendagri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah.

### *Education for All*

a.l. Menghapus disparitas gender dalam pendidikan dasar dan menengah menjelang tahun 2005 dan mencapai persamaan gender dalam pendidikan menjelang tahun 2015. Rencana Aksi Nasional PUG bidang pendidikan dengan fokus utama mengatasi kesenjangan gender bidang pendidikan.

### **Deklarasi Dakar**

Dalam Deklarasi Dakar dibahas mengenai pendidikan untuk semua, yaitu meliputi:



1. Memperluas dan memperbaiki keseluruhan perawatan dan pendidikan anak usia dini, terutama bagi anak-anak yang sangat rawan dan kurang beruntung.
2. Menjamin bahwa menjelang tahun 2015, semua anak, khususnya anak perempuan, anak-anak dalam keadaan sulit, dan mereka yang termasuk minoritas etnik, mempunyai akses dan menyelesaikan pendidikan dasar yang bebas dan wajib dengan kualitas baik.
3. Menjamin bahwa kebutuhan belajar semua manusia muda dan orang dewasa terpenuhi melalui akses yang adil pada program-program belajar dan kecakapan hidup (*life skills*) yang sesuai.
4. Mencapai perbaikan 50 % pada tingkat keniraksaraan orang dewasa menjelang tahun 2015, terutama bagi kaum perempuan, dan akses yang adil pada pendidikan dasar dan berkelanjutan bagi semua orang dewasa.
5. Menghapus disparitas gender dalam pendidikan dasar dan menengah menjelang tahun 2015, dan mencapai persamaan gender dalam pendidikan menjelang tahun 2015 dengan fokus jaminan bagi perempuan atas akses penuh dan sama pada prestasi dalam pendidikan dasar dengan kualitas yang baik.
6. Memperbaiki semua aspek kualitas pendidikan dan menjamin keunggulannya, sehingga hasil-hasil belajar yang diakui dan terukur dapat diraih oleh semua, terutama dalam keaksaraan, angka dan kecakapan hidup (*life skills*) yang penting.

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa secara umum kualitas pendidikan di Indonesia sangat memprihatinkan. Secara internasional. Indikatornya adalah rendahnya indeks sumber daya manusia yang termasuk paling rendah di Asia Tenggara, meskipun dalam perhitungan indeks tersebut sektor pendidikan hanya merupakan salah satu bagian saja. Hasil survey *Human Development Index* (HDI) menemukan, Indonesia menduduki peringkat 102 dari 106 negara. Ini berarti bahwa masyarakat Indonesia berada di urutan di bawah negara yang baru saja bangkit, Vietnam. Juga hasil survey dari *The Political Economic Risk Consultation* (PERC) melaporkan, Indonesia berada paling buncit dari 12 negara yang disurvei, dan laporan dari lembaga kajian The Third International Mathematics and Science Study Repeat (TIMSS-R) 1999 menyatakan bahwa siswa Indonesia menempati urutan ke-32 untuk IPA dan ke-34 untuk matematika dari 38 negara di Asia, Australia, dan Afrika.

Fakta ini membuat banyak kalangan terganggu. Mereka menuding penyebab semua itu berada di tangan Departemen Pendidikan, sebagai penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Pihak pengelola pendidikan di Indonesia, tentu saja menangkis tuduhan yang diarahkan kepadanya. Alasannya, perhitungan HDI, PERC dan TIMSS-R itu menyangkut banyak aspek dan tidak hanya komponen pendidikan,



melainkan juga faktor kesehatan, gizi masyarakat, kondisi ekonomi dan masih banyak lagi.

Di dalam negeri, rendahnya kualitas pendidikan terlihat dari krisis multidimensi yang sudah bertahun-tahun tetapi juga belum teratasi. Kondisi ekonomi negara buruk, disintegrasi bangsa mengancam, dekadensi moral secara gamblang terjadi pada semua lapisan masyarakat, dan masih banyak lagi contoh lain. Berbagai kondisi, baik dalam taraf nasional maupun internasional menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia belum mampu menjawab tantangan lokal, apalagi tantangan global.

Jika semua mau jujur, tudingan masyarakat tentang penyebab rendahnya HDI di Indonesia itu ada benarnya, yakni akar masalah berada di tangan dunia pendidikan. Pendidikan Indonesia tengah mengalami proses involusi atau bergerak tanpa arah yang jelas. Dari hari ke hari manusia yang terlibat dalam pendidikan bukannya tumbuh semakin cerdas, tetapi mutunya semakin menurun, meskipun input fasilitas fisiknya terus bertambah. Ketidakjelasan arah pendidikan itu menyebabkan pendidikan di Indonesia tidak kompetitif lagi dibandingkan dengan pencapaian negara-negara lain, bahkan di wilayah Asia Tenggara sekalipun. Menurut Dr. Francis Wahono, aktivis organisasi nonpemerintah yang bergerak di bidang pendidikan, apabila proses involusi yang tengah terjadi dalam pendidikan di Indonesia dibiarkan terus berlangsung, dalam kurun waktu tujuh sampai sepuluh tahun mendatang, Indonesia akan menjadi bangsa paria di kawasan Asia Tenggara.

Pendidikan Indonesia dari berbagai jenjang sebatas meluluskan konsumen ilmu yang luar biasa. Ada perguruan tinggi swasta yang targetnya hanya mencari mahasiswa sebanyak mungkin tanpa memperhatikan kualitas pembelajarannya, sampai-sampai ada perguruan tinggi swasta yang menjual gelar doktor di mana peserta didik hanya diwajibkan membayar biaya dalam jumlah tertentu (Solopos, 27 April 2005).

Pendidikan adalah kekuatan pokok suatu negara untuk mengembangkan dan memberdayakan masyarakatnya. Apabila pendidikan suatu negara hancur, maka negara tersebut akan mudah diombang-ambingkan oleh negara lain yang ingin menjajah dan menguasainya. Begitu pentingnya pendidikan bagi masyarakat, sehingga setiap negara berlomba-lomba memajukan pendidikan untuk membangun bangsanya lebih maju dan berharkat serta berwibawa.

Paulo Freire dalam bukunya "Pendidikan sebagai Proses" menyatakan pendidikan adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mencapai perubahan, sehingga dengan pendidikan tersebut, seorang manusia dapat menemukan jati dirinya. Dalam konteks bangsa Indonesia, polemik tentang masalah pendidikan sudah berlangsung sejak bertahun-tahun, bahkan investasi yang dilakukan sejak pemerintahan Soeharto



telah salah kaprah. Pembangunan di bidang pendidikan selama ini hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tanpa diikuti oleh pembangunan karakter bangsa (pembangunan nilai). Hal ini diperparah lagi dengan munculnya krisis ekonomi dan dilanjutkan dengan pergolakan politik yang hebat di negara ini tahun 1997 dan ditandai dengan jatuhnya rezim otoriter Orde Baru Soeharto tahun 1998.

Berawal dari hal tersebut, pendidikan bangsa ini semakin lama semakin terabaikan dan tertelantarkan. Dunia pendidikan di Indonesia sangat sulit digambarkan dan dipredikasi masa depannya. Sebelum membicarakan tentang mutu, tentang angka-angka pun sudah membingungkan. Belum lagi sejumlah masalah terkait pendidikan yang terjadi akhir-akhir ini. Sejumlah gedung sekolah di berbagai daerah kondisinya memprihatinkan, bahkan ambruk. Kondisi pembiayaan pendidikan yang harus ditanggung oleh orang tua siswa juga memprihatinkan, Ujian Akhir Nasional (UAN) sampai kini juga masih bermasalah, sekolah kekurangan guru, dan yang paling memprihatinkan adalah akses yang lebih jauh terhadap sistem pendidikan yaitu pengangguran.

Penderitaan mayoritas masyarakat bangsa ini akibat krisis ekonomi setelah sekian lama, bukannya semakin mengindikasikan tanda-tanda perbaikan dan perubahan nasi ke arah yang lebih baik, malah dalam beberapa tahun belakangan ini semakin terpuruk dan menderita kemiskinan serta kebodohan berkepanjangan, yang kemudian menggiring bangsa ini ke dalam krisis multidimensional. Hal ini berpengaruh besar terhadap semakin menyempitnya ruang kesempatan dan peluang mayoritas masyarakat menengah bawah untuk memperoleh pendidikan yang layak dan memadai. Sementara, pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara, tanpa adanya perbedaan status sosial dan ekonominya, tanpa memandang apakah dia miskin atau kaya, tinggal di desa ataupun di kota, serta anak pejabat atau anak gembala sekalipun.

Sejak awal, *founding fathers* bangsa ini sudah menanamkan semangat, tekad, dan *political will* untuk memperjuangkan keadilan bagi seluruh warga negara, termasuk di dalamnya untuk memperoleh hak pendidikan yang layak dan mumpuni. Cita-cita luhur ini kemudian dituangkan ke dalam rumusan mukaddimah UUD 1945, yaitu: "...mencerdaskan kehidupan bangsa..", dan menjadi salah satu dasar negara pada sila kelima Pancasila, berupa, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Dengan landasan fundamental dan legitimasi konstitusional tersebut, melalui Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) Nomor 2 Tahun 1989, pemerintah selanjutnya lebih memperluas cakupan makna dan muatannya ke dalam rumusan tujuan pendidikan nasional, yaitu: "Mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan



jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.” (UUSPN Pasal 4).

Dari landasan tersebut, dalam praktiknya, pendidikan tidak harus melulu ditempuh melalui jalur formal secara berjenjang mulai dari pendidikan pra-sekolah hingga perguruan tinggi, tetapi juga mengabsahkan pelaksanaan pendidikan secara nonformal dan informal (pendidikan luar sekolah), yang basisnya diperkuat mulai dari pendidikan di lingkungan keluarga, masyarakat dan lembaga-lembaga pendidikan swasta.

#### Pemerataan Pendidikan

Meski Sistem Pendidikan Nasional (SPN) tidak ketat dalam menerapkan peraturan dalam pelaksanaan pendidikan, tapi satu pertanyaan yang barangkali membutuhkan kepedulian dan keseriusan dari semua pihak sebagai warga negara adalah, benarkan “semangat keadilan” (*spirit of justice*) yang selama ini tertuang dalam UUD 1945 sebagai landasan negara dan sistem perundang-undangan pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sudah terwujud dan dirasakan dampak positifnya bagi semua lapisan masyarakat, tanpa adanya pengaruh dari perbedaan status sosial dan ekonomi? Apakah putra bangsa yang hanya mengenyam pendidikan luar sekolah, yang tidak pernah memasuki pendidikan sekolah (formal dan berjenjang) atau bahkan mereka yang sama sekali tidak pernah mengenyam dunia pendidikan, mempunyai kesempatan yang sama untuk memasuki dunia kerja (pasar tenaga kerja)? Apakah kesempatan mereka sama dengan saudara-saudara mereka yang secara *background* status sosial dan ekonominya memungkinkan untuk memasuki pendidikan formal, sehingga mereka mempunyai kesempatan dan akses yang lebih luas untuk memasuki dunia kerja.

Membicarakan kehidupan golongan masyarakat yang menderita akibat kondisi perekonomian maupun pendidikan tak akan pernah ada habisnya dan memperpanjang daftar persoalan bangsa ini. Dengan demikian, kepedulian terhadap realitas kebangsaan, terutama mengenai keterpurukan dunia pendidikan, setidaknya akan menumbuhkan kesadaran bagi semua elemen bangsa, bahwa betapa agenda kebangsaan terbesar saat ini terletak pada dunia pendidikan. Selanjutnya dengan modal kesadaran ini, semua elemen bangsa seharusnya mulai lebih serius untuk mencari *problem solving*-nya.

Dapat dikatakan, agenda kebangsaan terbesar saat ini terletak pada pendidikan, dengan didasarkan kenyataan bahwa seluruh sektor kehidupan bangsa merupakan concern sumber daya manusia (*human resources*) yang dihasilkan dari output dunia pendidikan. Hal ini berarti bahwa bagaimanapun, – disadari maupun tidak disadari – hanya melalui pintu atau saluran pendidikan bangsa ini diharapkan



dapat bangkit dari keterpurukan krisis multidimensional, dan kemudian menata ulang (*redesigning*) kehidupan berbangsa, membangun karakter bangsa (*character building*) atas dasar kearifan dan identitas tradisi lokal dan melanjutkan estafet pembangunan bangsa (*nation building*), terlebih di era globalisasi yang menunjukkan semakin ketatnya kompetisi negara-negara di seluruh dunia.

### ***Nation Character Building***

Bila dikaitkan dengan pembangunan karakter bangsa (*nation character building*), pendidikan bisa diartikan secara lebih sempit sebagai suatu cara membangun dalam kehidupan bersama. Dalam skala tataran antarkomunitas, tanpa melihat etnis, suku, agama, ras, dan sebagainya, kehidupan bersama berarti telah sepakat secara sadar untuk melakukan ikatan bagi anggotanya, menjadi suatu komunitas yang dilakukan dalam wilayah yang pasti dan sah, serta diakui komunitas masyarakat lainnya (baca: internasional). Dari sudut pandang ini kemudian muncul berbagai teori tentang bangsa dan negara.

Pendidikan agama, budi pekerti, dan Pancasila yang dilakukan sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi, bahkan pendidikan Pancasila yang juga telah ditatarkan kepada pejabat tinggi negara, pegawai negeri pada segala tingkatan, hingga organisasi kemasyarakatan, ternyata gagal membawa masyarakat kita ke arah yang lebih baik dalam hal membentuk karakter bangsa. Sulitnya memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), sulitnya mencari pimpinan sebagai panutan, dibiarkannya berbagai pelanggaran hak asasi manusia, tiadanya korelasi positif antara maraknya masyarakat yang pergi ke tempat ibadah dengan menurunnya tingkat KKN, rendahnya sensitivitas sosial dan lingkungan, seperti eksploitasi sumber daya alam yang cenderung mengabaikan dampak sosial dan lingkungan, merupakan beberapa contoh yang ada di depan mata.

Yang bisa dijadikan instrumen untuk menjelaskan fenomena di atas tampaknya adalah peranan pendidikan dalam membangun karakter bangsa (*character building*). Sangat disayangkan, sudah lebih dari setengah abad kita merdeka tampak sekali bahwa pembentukan karakter bangsa dalam arti yang sebenarnya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Lebih jelas lagi selama 32 tahun Orde Baru mengendalikan negara dengan ciri yang sentralistik, pertumbuhan ekonomi dijadikan sebagai fokus pembangunan, perbedaan dijadikan barang tabu, kawalan “siaga” senjata dipakai sebagai legitimasi atas nama stabilitas untuk pembangunan. Pendidikan tidak diletakkan dalam konteks investasi strategis, sehingga biaya pendidikan selalu dibuat minim; selalu di bawah 10 persen dari APBN. Konsekuensinya, dampak negatif pada lambatnya pembangunan nilai-nilai dalam membangun karakter bangsa.



Dalam kondisi ini, secara tidak sadar masyarakat tergiring menjadi “manusia robot”. Pada saat yang bersamaan muncul sifat serakah, keinginan jalan pintas dalam memecahkan persoalan hidup, kurang sensitif terhadap kelompok masyarakat lain yang sedang menderita dan sebagainya. Semua itu karena terdorong kuat oleh dampak pembangunan yang terfokus pada pertumbuhan ekonomi yang dipatok tinggi, yang pada gilirannya menuju ke arah budaya konsumerisme. Gap kaya miskin menjadi sangat lebar. Ketidakpuasan timbul di mana-mana. Krisis ekonomi menjalar cepat pada krisis politik. Dari sisi sosiologi pembangunan, meminjam tesis Rostow, yang menekankan pendekatan prasyarat pembangunan sehingga muncul lima tahap pembangunan, sangat jelas bila dipakai untuk memahami fenomena yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dengan pandangan ini, tidak terlalu keliru bila kerusakan berujung pada gejala disintegrasi bangsa, akhirnya bersumber dari lemahnya pendidikan dalam membentuk karakter bangsa.

Dalam konteks memahami fenomena ini, menarik disimak saran Unesco bahwa pendidikan harus mengandung tiga unsur: a) belajar untuk tahu (*learn to know*), b) belajar untuk berbuat (*learn to do*), dan c) belajar untuk hidup bersama (*learn to live together*). Unsur pertama dan kedua lebih terarah membentuk *having*, agar sumber daya manusia mempunyai kualitas dan keterampilan (*skill*). Unsur ketiga lebih terarah *being*, menuju pembentukan karakter bangsa. Kini unsur itu menjadi amat penting. Pembangkitan semangat dan rasa nasionalisme, yang bukan ke arah nasionalisme sempit, penanaman etika berkehidupan bersama, termasuk berbangsa dan bernegara, pemahaman hak asasi manusia secara benar, menghargai perbedaan pendapat, tidak memaksakan kehendak, pengembangan sensitivitas sosial dan lingkungan dan sebagainya, merupakan beberapa hal unsur pendidikan, melalui belajar untuk hidup bersama. Pendidikan dari unsur ketiga ini sudah semestinya dimulai sejak taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi.

### **Menghadapi Globalisasi**

Globalisasi mempersyaratkan persiapan sumber daya manusia yang berkualitas (*qualified human resource*), tentunya dengan tingkat penguasaan sains dan teknologi yang mumpuni, terutama teknologi komunikasi, dan dengan pembekalan basic moralitas yang tergal dari kearifan tradisi-kultural dan nilai-nilai doktrinal agama yang kuat. Tanpa itu semua, kehadiran bangsa Indonesia yang sudah nyata-nyata berada di tengah pentas kompetisi global, hanya sekadar akan makin menyengsarakan masyarakat lokal (nasional) dan menempatkan bangsa ini pada posisi pinggiran (*peripheral*), hanya menjadi penonton dari hiruk pikuknya percaturan negara-negara secara global di berbagai dimensi kehidupan. Selanjutnya, ketidaksiapan bangsa Indonesia dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan bermoral yang



dipersiapkan untuk terlibat dan berkiprah dalam kancah globalisasi, menimbulkan eksese negatif yang tidak sedikit jumlahnya bagi seluruh lapisan masyarakat, baik secara politik, ekonomi, maupun budaya. Di sinilah menunjukkan bahwa pendidikan menjadi agenda prioritas kebangsaan yang tidak bisa ditunda-tunda lagi untuk diperbaiki seoptimal mungkin.

Pendidikan merupakan bentuk dari investasi jangka panjang (long-term investmen), yaitu dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui saluran pendidikan. Hal ini berarti bahwa untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas di masa depan, sudah seharusnya masyarakat melakukan investasi sebesar-besarnya untuk peningkatan kualitas (proses dan hasil) dunia pendidikan. Untuk berpartisipasi dalam investasi guna meningkatkan kualitas pendidikan, membutuhkan pengeluaran dana yang tidak sedikit, sedangkan sebagian besar masyarakat secara ekonomi dalam kategori menengah ke bawah, sehingga tidak memungkinkan untuk diharapkan kontribusinya secara maksimal.

Salah satu jalan keluarnya kemudian adalah memperkuat *basic civil society* dan demokratisasi di Indonesia melalui dunia pendidikan. Problem terbesar bangsa ini adalah bidang pendidikan, yang berarti menyangkut kepentingan seluruh elemen bangsa. Untuk menyelesaikan masalah bangsa tersebut tentu saja dibutuhkan keterlibatan, partisipasi aktif, dan keseriusan dari semua elemen bangsa. Demikian pula dengan problem keterpurukan pendidikan nasional, yang di dalamnya memuat upaya-upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, penanaman nilai-nilai (*internalizing of values*), serta moralitas yang baik bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Perubahan yang sangat vital dan fundamental dari kehidupan berbangsa dewasa ini, pada gilirannya berpenetrasi terhadap dunia pendidikan, sehingga semakin memunculkan warna yang berbeda dengan sebelumnya. Tampaknya dunia pendidikan Indonesia mulai mempertimbangkan penerapan konsep "education based community" (konsep pendidikan berbasis komunitas-masyarakat). Malik Fadjar, mantan meenteri Pendidikan Nasional) melihat adanya indikasi positif dari penerapan konsep ini. Pendidikan berbasis masyarakat dengan serangkaian agenda, yaitu; Pertama, memobilisasi sumber daya setempat dan dari luar guna meningkatkan peranan masyarakat untuk mengambil bagian yang lebih besar dalam perencanaan, implementasi, evaluasi penyelenggaraan pendidikan di semua jalur, jenjang, jenis, dan satuan masyarakat. Kedua, menstimulasi perubahan sikap dan persepsi masyarakat terhadap rasa kepemilikan sekolah, dengan cara ikut bertanggung jawab melalui kemitraan, toleransi dan kesediaan menerima keragaman sosial-budaya. Ketiga, mendukung masyarakat untuk mengambil peran yang jelas dalam pendidikan, terutama, orang tua dalam paket kebijakan desentralisasi. Keempat, mendorong peran masyarakat dalam



---

mengembangkan inovasi kelembagaan untuk melengkapi, mempertegas peran sekolah, meningkatkan mutu, dan relevansi, efisiensi manajemen pendidikan serta membuka kesempatan sekolah yang lebih besar demi program wajib belajar (wajib) sembilan tahun pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

## V. PENUTUP

Instrumen untuk menjelaskan fenomena keterpurukan bangsa tampaknya adalah peranan pendidikan dalam membangun karakter bangsa (*character building*). Sangat disayangkan, sudah lebih dari setengah abad kita merdeka tampak sekali bahwa pembentukan karakter bangsa dalam arti yang sebenarnya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Lebih jelas lagi selama 32 tahun Orde Baru mengendalikan negara dengan ciri yang sentralistik, pertumbuhan ekonomi dijadikan sebagai fokus pembangunan, perbedaan dijadikan barang tabu, kawalan “siaga” senjata dipakai sebagai legitimasi atas nama stabilitas untuk pembangunan.

Hari pendidikan nasional yang diperingati setiap tahun sudah saatnya dijadikan momentum untuk evaluasi diri dan titik tolak untuk memperbaikinya. Sebagai langkah awal, diskusi yang melibatkan pengambil keputusan dan praktisi pendidikan ke segala tingkatan dengan fokus pembenahan sistem pendidikan secara holistik dan pembangunan karakter bangsa melalui pendidikan, sudah mendesak dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fisher, Bobbi. 1991. *Joygull Learning*. New Hampshire: Heinemann
- Huda, Nuril. 1999. “*Decentralization: Why, How, and Toward What Ends?*”. NCREL’s Policy Briefs, Report 1.
- Lezotte, L.W. 1989. “*Effective Schools Research Model for Planned Change*”. Effective Schools Products, Limited. July. Michigan: Okemos.
- Lockheed, M.E. and Levin, H.M. 1990. “*Creating Effective Schools*” Chapter 1 in *Effective Schools in Developing Countries*. HM. Levinand, M.E. Lockhead, Eds. Whashington DC: Falmer Press.



- 
- Schikedanz, et. al. 1985. *Strategies for Teaching Young Children*. New Jersey: Prentice Hall
- Squires, D.A., Huitt, W.G., & Segars, J.K. *Effective Schools and Classrooms: A Research-Based Perspective*. Association for Supervision and Curriculum Development. Virginia: Alezandria
- Sudono, Anggani. 1996. *Sumber belajar TK dan Alat Permainan*. Jakarta: Proyek Pendidikan Tenaga Guru Depdikbud
- Sudono, Anggani. 1998. *Makalah untuk PGTKI Cut Meutiah*. Jakarta: Depdiknas
- Thoha, Miftah. 1999. *Desentralisasi Pendidikan*. Dalam Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 017 Tahun Kelima. Juni.
- Umaedi. 1999. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Menengah, Depdikbud



# DAFTAR ISI JURNAL PRANATA HUKUM

## VOLUME 1 NOMOR 1 Sampai dengan VOLUME 3 NOMOR 2

### VOLUME 1 NOMOR 1

<b>NURHADIAANTOMO</b> Kekuasaan Kehakiman dan Pandangan Hukum Progresif: Hakim dan Rasa Keadilan Masyarakat	1 - 14
<b>YULIANETA M.</b> Kedudukan Sumbangan Pihak Ketiga terhadap Keuangan Daerah Propinsi Lampung	15 - 30
<b>IGA K. RACHMI HANDAYANI</b> Implikasi Pelaksanaan Otonomi Daerah terhadap Kebijakan Hukum Lingkungan	31 - 45
<b>JP. WIDODO</b> Analisis Kebijakan Kriminal terhadap Kejahatan dalam Rumah Tangga	46 - 58
<b>GUNAWAN JATMIKO</b> Tinjauan terhadap Tindak Pidana dalam Praktek Kedokteran	59 - 64
<b>IGEDE AB. WIRANATA</b> Revitalisasi Pengaturan Alih Fungsi Tanah dalam Kegiatan Investasi	65 - 86

### VOLUME 2 NOMOR 1

<b>HMSI REGAR</b> Hukum dan Kekuasaan Hukum	1 - 15
<b>TAMIRUSLI</b> Kekuatan Pembuktian <i>Digital Signature</i> dalam <i>Electronic Commerce</i>	16 - 28
<b>ZULFIDIANE ZAINI</b> Perjanjian Kredit Perbankan Berdasarkan Prinsip Syariah Menurut Undang-undang Perbankan di Indonesia	29 - 49
<b>LINTJE ANNA M.</b> Eksistensi Peraturan Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah Menuju <i>Good Government</i>	50 - 59
<b>ERINA PANE</b> Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam	60 - 78
<b>ANTORY ROYAN ADYAN</b> Kekuatan Hukum <i>Visum et Repertum</i> sebagai Alat Bukti Ditinjau dari KUHP dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	79 - 88

## **VOLUME 2 NOMOR 2**

**ANTORY ROYAN ADYAN**

Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana di Bidang Perpajakan 89 - 95

**AGUS ISKANDAR**

Hubungan Hukum para Pihak dalam Penerbitan Obligasi (Kajian Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal) 96 - 103

**LINTJE ANNA M.**

Prospektif Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial Menurut Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 104 - 112

**TAMIRUSLI**

Pengaturan Hukum dalam *E-Commerce* untuk Melakukan Kegiatan Perdagangan di Indonesia 113 - 124

**ZULFIDIANE ZAINI**

Perbandingan Aspek Hukum Perbankan Konvensional dan Perbankan Berdasarkan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Operasional Lembaga Perbankan di Indonesia 125 - 138

**MEITA DJOHAN OE**

Akibat Hukum Bagi Pelaku Perjanjian Barter dalam Transaksi Perdagangan Ekspor-Import di Indonesia 139 - 145

## **VOLUME 3 NOMOR 1**

**APRINISA**

Analisis Yuridis Pembentukan Undang-undang Perbankan Syariah 1 - 12

**ERINA PANE**

Hak Guna Air dalam Hubungannya dengan Privatisasi Pengelolaan Sumberdaya Air 13 - 30

**TAMIRUSLI**

Peralihan Hak Milik dan Daya Ikat dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen 31 - 40

**ACHMAD IHSAN**

Hak Tersangka dan Terdakwa dalam Proses Peradilan Anak Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 41 - 48

**M. NASIR YUSUF**

Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Bagi Hasil Berdasarkan Prinsip Syariah 49 - 62

**BAKTISIAHAAN**

Akibat Hukum Pernyataan Kepailitan terhadap Perseroan Terbatas 63 - 75



## **VOLUME 2 NOMOR 2**

### **ANTORY ROYAN ADYAN**

Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

89 - 95

### **AGUS ISKANDAR**

Hubungan Hukum para Pihak dalam Penerbitan Obligasi (Kajian Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal)

96 - 103

### **LINTJE ANNA M.**

Prospektif Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial Menurut Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004

104 - 112

### **TAMIRUSLI**

Pengaturan Hukum dalam *E-Commerce* untuk Melakukan Kegiatan Perdagangan di Indonesia

113 - 124

### **ZULFIDIANE ZAINI**

Perbandingan Aspek Hukum Perbankan Konvensional dan Perbankan Berdasarkan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Operasional Lembaga Perbankan di Indonesia

125 - 138

### **MEITA DJOHAN OE**

Akibat Hukum Bagi Pelaku Perjanjian Barter dalam Transaksi Perdagangan Ekspor-Import di Indonesia

139 - 145

## **VOLUME 3 NOMOR 1**

### **APRINISA**

Analisis Yuridis Pembentukan Undang-undang Perbankan Syariah

1 - 12

### **ERINA PANE**

Hak Guna Air dalam Hubungannya dengan Privatisasi Pengelolaan Sumberdaya Air

13 - 30

### **TAMIRUSLI**

Peralihan Hak Milik dan Daya Ikat dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen

31 - 40

### **ACHMAD IHSAN**

Hak Tersangka dan Terdakwa dalam Proses Peradilan Anak Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997

41 - 48

### **M. NASIR YUSUF**

Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Bagi Hasil Berdasarkan Prinsip Syariah

49 - 62

### **BAKTISIAHAAN**

Akibat Hukum Pernyataan Kepailitan terhadap Perseroan Terbatas

63 - 75

## VOLUME 3 NOMOR 2

### TAMIRUSLI

Hak Tanggungan sebagai Lembaga Jaminan terhadap Hak Milik  
atas Tanah..... 77-91

### LINTJEANNA M (TIM PENELITIAN)

Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Air dalam Hubungannya dengan  
Otonomi Daerah (Studi di Propinsi Lampung)..... 92 - 118

### JOKO S.

Fungsi *Visum et Repertum* dalam Sistem Peradilan Pidana..... 119 - 130

### AGUS ISKANDAR

Penerapan Prinsip 5C's dalam Perjanjian Kredit Perbankan sebagai Dasar  
Prinsip Kehati-hatian ..... 131 - 144

### LINTJEANNA M.

Eksistensi UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas  
UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam Rangka  
Pelaksanaan Incumbent dan Calon Independen..... 145 - 152

### IGAK RACHMI HANDAYANI

Analisis Kesenjangan Gender dan Dinamika Pendidikan di Indonesia ..... 153 - 163